



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

Jabatan : BUPATI PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,


H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

Pihak Pertama,


ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

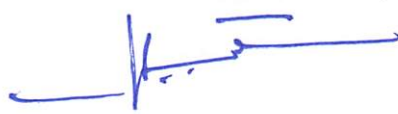
NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,200
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,100
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Angka	77,50

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 9.963.617.000	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.250.984.000	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 545.280.000	

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

Pihak Pertama,

ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
 NIP. 19740706 199311 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKO PRIYO SUTOMO, S.H.**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.**

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak Pertama

EKO PRIYO SUTOMO, S.H.
NIP. 19680118 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SEKRETARIS

PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Persen	100
	- Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5
	- Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12
2	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Persen	100
		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100
4	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan eksternal	Persentase penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan eksternal	Persen	96,5
5	Meningkatnya kualitas dan konsistensi kebijakan teknis pengawasan internal	Persentase kebijakan teknis pengawasan daerah yang selaras dan/ atau terintegrasi dengan kebijakan teknis pengawasan nasional	Persen	100

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.963.617.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.629.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.110.000	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.519.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.725.882.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625.946.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.030.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.092.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	445.382.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.756.000	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	366.537.000	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	73.106.000	



Pihak Kedua,

ATO SUSANTO, AP, M.Si., CGCAE., CFA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak Pertama,

EKO PRIYO SUTOMO, S.H.
NIP. 19680118 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM KUNCORO, S.E.**

Jabatan : Plt. IRBANWIL I INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.**

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

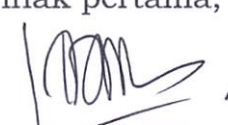
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak pertama,

IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindakan Hasil Pemeriksaan Wilayah I	Persen	94,50
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal wilayah I	Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit	Persen	100
	- Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	13
	- Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	17
	- Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	35
	- Terlaksananya Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	9
2	Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai akuntabilitas meningkat setelah pendampingan pada wilayah I	Persen	100
	Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada wilayah I	Persentase perangkat daerah pada wilayah I yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan	Persen	100
	- Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	13
	- Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	18

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyelenggaraan Pengawasan	191.137.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	191.137.000	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47.666.000	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33.675.000	
	- Reviu Laporan Kinerja	54.329.000	
	- Pengawasan Desa	55.467.000	
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	41.784.000	
	Pendampingan dan Asistensi	41.784.000	
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	28.750.000	
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.034.000	



Pihak kedua,

ATO SUSANTO, AP.M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak pertama,


IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM KUNCORO, S.E.**

Jabatan : IRBANWIL II INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.**

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak pertama,

IMAM KUNCORO, S.E
NIP. 19771106 200502 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II	Persen	93,25
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal wilayah II	Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit	Persen	100
	- Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	13
	- Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	18
	- Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	35
	- Terlaksananya Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	7
2	Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai akuntabilitas meningkat setelah pendampingan pada wilayah II	Persen	100
	Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada wilayah II	Persentase perangkat daerah pada wilayah II yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan	Persen	100
	- Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	41

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyelenggaraan Pengawasan	291.137.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	291.137.000	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47.666.000	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	133.676.000	
	- Reviu Laporan Kinerja	54.329.000	
	- Pengawasan Desa	55.466.000	
2	Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi	57.498.000	
	Pendampingan dan Asistensi	57.498.000	
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	57.498.000	



Pihak Kedua,

ATO SUSANTO, AP, M.Si., CGCAE., CFA.

NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak Pertama,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUDY YANTI, S.E.**

Jabatan : Plt. IRBANWIL III INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.**

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama

RUDY YANTI, S.E.
NIP. 19720925 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III	Persen	95,25
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal wilayah III	Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit	Persen	100
	- Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	13
	- Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	17
	- Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	53
	- Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan pada Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1
	- Terlaksananya Pengawasan Desa pada Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	7
2	Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai akuntabilitas meningkat setelah pendampingan pada wilayah III	Persen	100
	Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada wilayah III	Persentase perangkat daerah pada wilayah III yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan	Persen	100

	- Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah III	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	41
--	---	--	------------------	----

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyelenggaraan Pengawasan	207.913.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	207.913.000	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47.668.000	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33.675.000	
	- Reviu Laporan Kinerja	54.330.000	
	- Reviu Laporan Keuangan	16.774.000	
	- Pengawasan Desa	55.466.000	
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	57.498.000	
	Pendampingan dan Asistensi	57.498.000	
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	57.498.000	



Pihak Kedua,

ATO SUSANTO, AP, M.Si., CGCAE., CFA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak Pertama,

RUDY YANTI, S.E.
NIP. 19720925 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YEKTI LESTARI WURYANINGSIH, S.E., M.Si.**

Jabatan : IRBANSUS INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.**

Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026



ATO SUSANTO, AP,M.Si.,CGCAE.,CFrA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak Pertama

YEKTI LESTARI W, S.E., M.Si.
NIP. 19751102 199903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya penanganan aduan berkadar pengawasan	Persentase penyelesaian tindaklanjut aduan berkadar pengawasan	Persen	100
	Meningkatnya kualitas pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun sesuai standar audit	Persen	100
	- Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Laporan	2
	- Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	28
2	Meningkatnya budaya antikorupsi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK	Persen	100
	Meningkatnya peran APIP dalam peningkatan budaya antikorupsi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi peningkatan budaya antikorupsi	Persen	100
	- Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
	- Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyelenggaraan Pengawasan	194.260.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	194.260.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	44.618.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	149.642.000	
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	315.394.000	
	Pendampingan dan Asistensi	315.394.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	179.550.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	135.844.000	



Pihak Kedua,

ATO SUSANTO, AP, M.Si., CGCAE., CFA.
NIP. 19740706 199311 1 001

Pihak Pertama,

YEKTI LESTARI W, S.E., M.Si
NIP. 19751102 199903 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALUN PRAMUDIONO, S.H.**

Jabatan : KASUBBAG ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **EKO PRIYO SUTOMO, S.H.**

Jabatan : Plt.SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KAB.PURBALINGGA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

EKO PRIYO SUTOMO, S.H.
NIP. 19680118 199003 1 003

Pihak Pertama

ALUN PRAMUDIONO, S.H.
NIP. 19790705 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASUBBAG ANALISIS DAN EVALUASI
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kualitas monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persentase laporan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	65
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang dirumuskan sesuai ketentuan	Persen	100
	- Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Dokumen	2

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	366.537.000	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	366.537.000	
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	73.106.000	
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	73.106.000	

Pihak Kedua,



EKO PRIYO SUTOMO, S.H.
NIP. 19680118 199003 1 003

Pihak Pertama,



ALUN PRAMUDIONO, S.H.
NIP. 19790705 201001 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUSTIN DIAH PURNAMAWATI, S.E.**
Jabatan : KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **EKO PRIYO SUTOMO, S.H.**
Jabatan : Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
KAB.PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

EKO PRIYO SUTOMO, S.H.
NIP. 19680118 199003 1 0032

Pihak Pertama

AGUSTIN DIAH PURNAMAWATI, S.E.
NIP. 19820823 201001 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100
	- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48
	- Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
	- Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12
2	Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban Jam Latihan	Persentase	100
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan latihan	Orang	48
	- Terlaksananya bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	48
3.	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100
	- Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1
	- Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1
	- Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	- Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100
	- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12
	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	2

	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	- Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2
5	Terpenuhi sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100
	- Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1
	- Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	30
7	Terpenuhi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.725.882.000,00	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.499.374.000,00	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.000.000,00	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.508.000,00	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625.946.000,00	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	369.000.000,00	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	256.846.000,00	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.030.000,00	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.030.000,00	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.000.000,00	
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.092.000,00	

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.600.000,00	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.992.000,00	
5.	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000,00	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000,00	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	445.382.000,00	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.732.000,00	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.650.000,00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	673.756.000,00	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.136.000,00	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.620.000,00	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.000.000,00	

Pihak Kedua,



EKO PRIYO SUTOMO, S.H.

NIP. 19680118 199003 1 003

Pihak Pertama,



AGUSTIN DIAH PURNAMAWATI, SE

NIP. 19820823 201001 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fita Fatmawati, S. Si., M. Si., CFrA.

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Fita Fatmawati, S. Si., M. Si., CFrA.

NIP. 19850108 201101 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Ahli Muda

Pada Inspektur Pembantu Khusus

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Konsep LHP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Konsep LHP	1
		Jumlah KKP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	KKP	1
2.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Konsep LHP Pengawasan dengan tujuan tertentu	Konsep LHP	8
		Jumlah KKP Pengawasan dengan tujuan tertentu	KKP	10
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4.	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.
NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



Fita Fatmawati, S. Si., M. Si., CFA.
NIP. 19850108 201101 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Harwoko., ST., M.Si, CFrA.

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M.Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

YEKTI LESTARI .W, SE., M.Si., FRMP

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

IMAM HARWOKO, ST., M.Si, CFrA.

NIP. 19761015 200101 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja: Auditor Ahli Muda

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah KKP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	KKP	2
2.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Konsep LHP Pengawasan dengan tujuan tertentu	Konsep LHP	7
		Jumlah KKP Pengawasan dengan tujuan tertentu	KKP	11
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4.	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,

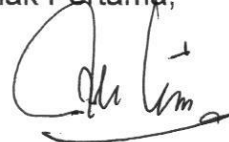


YEKTI LESTARI .W, SE., M.Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



IMAM HARWOKO., ST., M.Si, CFA.

NIP. 19761015 200101 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Dhanu Pratama, A.Md.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, S.E., M.Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yekti Lestari Wuryaningsih, S.E., M.Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Ridho Dhanu Pratama, A.Md.

NIP. 19930705 202203 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Auditor Terampil pada Inspektur Pembantu Khusus

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah KKP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	KKP	2
2.	Terselesaikannya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah KKP Pengawasan dengan tujuan tertentu	KKP	18
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.

Ridho Dhanu Pratama, A.Md.

NIP. 19751102 199903 2 004

NIP. 19930705 202203 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDY YANTI, SE.

Jabatan : Auditor Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Rudy Yanti, SE.

NIP. 19720925 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Ahli Madya

Pada Inspektur Pembantu Khusus

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah LHP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	LHP	2
2.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah LHP Pengawasan dengan tujuan tertentu	LHP	28
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



Rudy Yanti, SE.

NIP. 19720925 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Valentina Budiman, S.E.

Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, S.E., M.Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yekti Lestari Wuryaningsih, S.E., M.Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Shinta Valentina Budiman, S.E.

NIP. 19940214 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Khusus

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah KKP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	KKP	2
2.	Terselesaikannya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah KKP Pengawasan dengan tujuan tertentu	KKP	18
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4.	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.
NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



Shinta Valentina Budiman, S.E.
NIP. 19940214 202203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Sidiyanti, S.E.

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M.Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

YEKTI LESTARI WURYANINGSIH, SE., M.Si., FRMP

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

VITA SIDYANTI, SE.

NIP. 19931230 201903 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja: Auditor Ahli Muda

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah KKP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	KKP	2
2.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Konsep LHP Pengawasan dengan tujuan tertentu	Konsep LHP	7
		Jumlah KKP Pengawasan dengan tujuan tertentu	KKP	11
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4.	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



YEKTI LESTARI WURYANINGSIH, SE., M.Si., FRMP
NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



VITA SIDIYANTI, SE.
NIP. 19931230 201903 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Raharjo, A.Md.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Yekti Lestari Wuryaningsih, S.E., M.Si., FRMP.

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yekti Lestari Wuryaningsih, S.E., M.Si., FRMP.

NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Wahyu Raharjo, A.Md.

NIP. 19940302 202203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Auditor Terampil pada Inspektur Pembantu Khusus

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah KKP terkait Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	KKP	2
2.	Terselesaikannya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah KKP Pengawasan dengan tujuan tertentu	KKP	18
3.	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4
4.	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



Yekti Lestari Wuryaningsih, SE., M. Si., FRMP.
NIP. 19751102 199903 2 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



Wahyu Raharjo, A.Md.
NIP. 19940302 202203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Susmiyatun, S.H.

Jabatan : Auditor Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Imam Kuncoro, S.E
NIP. 19771106 200502 1 004

Pihak Pertama,

Sri Rahayu Susmiyatun, S.H.
NIP. 19730602 199803 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
AUDITOR AHLI MADYA
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terkendalinya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	7
	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep Laporan	6
2.	Terkendalinya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	14
	Terselesaikannya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep Laporan	2
3.	Terkendalinya Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	23
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Konsep Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Konsep Laporan	1
4.	Terkendalinya Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	Laporan	7
	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah Konsep Laporan Hasil Pengawasan Desa	Konsep Laporan	6
5.	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	13
6.	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	18

Purbalingga, Januari 2026

Pihak Kedua,



Imam Kuncoro, S.E
NIP. 19771106 200502 1 004

Pihak Pertama,



Sri Rahayu Susmiyatun, S.H.
NIP. 19730602 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistina, S.E.

Jabatan : Auditor Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, SE

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Imam Kuncoro, SE.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Sulistina, SE.

NIP. 19730319 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
AUDITOR AHLI MADYA
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terkendalinya Laporan Pengawasan Pemerintah Daerah pada Wilayah I Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah LHP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	6
	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	3
	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	1
2.	Terkendalinya Laporan Pengawasan Pemerintah Daerah pada Wilayah I Laporan Keuangan pada Wilayah I	Jumlah LHP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	3
	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep LHP	2
	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	3
3.	Terkendalinya Laporan Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah LHP terkait Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	7
	Terselesaikannya Laporan Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	8
4.	Terkendalinya Laporan Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah LHP terkait Pengawasan Desa	Konsep	9
	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Desa pada Wilayah 1	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Desa	Konsep LHP	2
	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Desa	KKP	2

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	13
6.	Terlaksananya pendampingan, asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Wilayah I	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	18

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Imam Kuncoro, SE.

NIP. 19771106 200502 1 004

Sulistina, SE.

NIP. 19730319 199803 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHY ANDRESWARA, ST

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : IMAM KUNCORO, S.E.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

ADHY ANDRESWARA, ST

NIP. 19760926 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

AUDITOR AHLI MUDA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Konsep Lapooran Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep Laporan	2
	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	8
	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep Laporan	3
	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	6
	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Konsep LH terkait Reviu Laporan Kinerja	Konsep Laporan	11
	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Reviu Laporan Kinerja	KKP	10
	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Desa	Konsep Laporan	4
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Desa	KKP	9
2.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	3
	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	3

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IMAM KUNCORO, S.E.

ADHY ANDRESWARA, ST

NIP. 19771106 200502 1 004

NIP. 19930627 201903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Resista, SE

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : IMAM KUNCORO, S.E.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Handwritten signature of Imam Kuncoro in black ink.

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Handwritten signature of Yuli Resista in black ink.

YULI RESISTA, SE

NIP. 19870720 201503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
AUDITOR AHLI MUDA
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	1
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	7
3.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep LHP	9
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	7
5.	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Reviu Laporan Kinerja	Konsep LHP	8
6.	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Reviu Laporan Kinerja	KKP	10
7.	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Desa	Konsep LHP	3
8.	Terselesaikannya Kertas Kerja Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Desa	KKP	10
9.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	2
10.	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	3

Pihak Kedua,



IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



YULI RESISTA, SE

NIP. 19870720 201503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Triatmojo, S.E.

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : IMAM KUNCORO, S.E.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

RIFQI TRIATMOJO, S.E.

NIP. 19930627 201903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	3
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	8
3.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	7
4.	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Reviu Laporan Kinerja	Konsep LHP	10
5.	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Reviu Laporan Kinerja	KKP	8
6.	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Desa	Konsep LHP	2
7.	Terselesaikannya Kertas Kerja Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Desa	KKP	9
8.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	2
9.	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	3

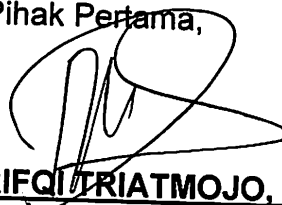
Pihak Kedua,



IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



RIFQI TRIATMOJO, S.E.
NIP. 19930627 201903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Asmarina, S.E.
Jabatan : Auditor Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : IMAM KUNCORO, S.E.
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, Januari 2026

Pihak Pertama,

NISA ASMARINA, S.E.
NIP. 19930624 202203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**Auditor Ahli Pertama
pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Terselesainya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	8
3.	Terselesainya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	8
5.	Terselesainya Kertas Kerja Laporan Kinerja pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Reviu Laporan Kinerja	KKP	9
7.	Terselesainya Kertas Kerja Hasil Pengawasan Desa pada Wilayah I	Jumlah KKP terkait Pengawasan Desa	KKP	12
8.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah I	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	2
9.	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	3

Purbalingga, Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004



NISA ASMARINA, S.E.

NIP. 19930624 202203 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Aminah, A.Md.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Imam Kuncoro, S.E

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Nina Aminah, A.Md.

NIP. 19901008 202203 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
AUDITOR TERAMPIL
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	10
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	9
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	KKR	13
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Desa pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Desa	KKP	11
2.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	Perangkat Daerah	2
	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	3

Pihak Kedua,



Imam Kuncoro, S.E

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



Nina Aminah, A.Md.

NIP. 19901008 202203 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhaniar Agustiyon, A.Md.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Imam Kuncoro, S.E.

Dhaniar Agustiyon, A.Md.

NIP. 19771106 200502 1 004

NIP. 19940815 202203 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Terampil

pada

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	9
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	9
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	KKR	12
	Terselesaikannya Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Desa pada wilayah I	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Desa	KKP	11
2.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	Perangkat Daerah	2
	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	3

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Imam Kuncoro, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004



Dhaniar Agustyan, A.Md.

NIP. 19940815 202203 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKO PRIYO SUTOMO, S.H.**

Jabatan : AUDITOR MADYA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **IMAM KUNCORO, S.E.**

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Pihak Pertama

EKO PRIYO SUTOMO, S.H.

NIP. 19680118 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

AUDITOR MADYA

PADA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Terkendalinya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	13
2	- Terkendalinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	25
3	- Terkendalinya Laporan Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	35
4	- Terkendalinya Laporan Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	8
5	- Terkendalinya Laporan pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	41

Pihak Kedua,



IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004

Pihak Pertama,



EKO PRIYO SUTOMO, S.H.
NIP. 19680118 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Tri Prapto Yuwono, ST.

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama

AGUS TRI PRAPTO YUWONO, ST

NIP. 19780811 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Ahli Muda

Pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Konsep Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	6
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	6
3.	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Konsep Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep LHP	11
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	11
5.	Terselesaikannya Konsep Laporan Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Konsep Laporan Reviu Laporan Kinerja	Konsep LHR	22
6.	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Reviu Laporan Kinerja	KKR	4
7.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Konsep Laporan Pengawasan Desa	Konsep LHP	1
8.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Konsep Laporan Pengawasan Desa	KKP	7
9.	Terlaksananya pendampingan asistensi urusan pemerintah daerah pada wilayah II	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Perangkat Daerah	18

Pihak Kedua,

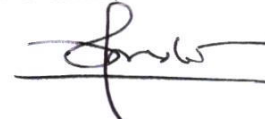


IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



AGUS TRI PRAPTO YUWONO, ST

NIP. 19780811 200903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananto Pratomo, S.E, M.Si.

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

ANANTO PRATOMO, S.E, M.Si

NIP. 19751111 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Muda

Pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Konsep LHP Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep LHP	14
2	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah KKP Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	4
3.	Terselesaikannya Konsep Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Konsep LHR Laporan Kinerja	Konsep LHR	13
4	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah KKR Laporan Kinerja	KKR	5
5.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Konsep LHP Pengawasan Desa	Konsep LHM	7
6.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah KKP Pengawasan Desa	KKM	1
7.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Konsep LHP Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	7
8.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah KKP Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	5
9.	Terselesaikannya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada Wilayah II	Jumlah Konsep Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	23

Pihak Kedua,

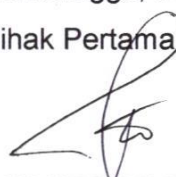


IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama



ANANTO PRATOMO, S.E, M.Si.

NIP. 19751111 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Dhayu Setyani, S.Akun.

Jabatan : Auditor Mahir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

IKA DHAYU SETYANI, S.Akun.

NIP. 19960527 201903 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Auditor Mahir
Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	5
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	19
3.	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	KKR	11
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Desa	KKP	8
5.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



IKA DHAYU SETYANI, S.Akun.
NIP. 19960527 201903 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Linati Azzaahi, A.Md.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IMAM KUNCORO, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

PUTRI LINATI AZZAAHI, A.Md.

NIP. 19960805 202203 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Auditor Terampil
Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	5
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	18
3.	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	KKR	12
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Desa	KKP	8
5.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	9

Pihak Kedua,



IMAM KUNCORO, S.E.
NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



PUTRI LINATI AZZAAHI, A.Md.
NIP. 19960805 202203 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurtyas Mei Setiana, S.Ak.

Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Imam Kuncoro, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Nurtyas Mei Setiana, S.Ak.

NIP. 19960502 202203 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Auditor Ahli Pertama

Pada


Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	5
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	15
3.	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	KKR	7
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Desa	KKP	4
5.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	8

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Imam Kuncoro, S.E.

Nurtyas Mei Setiana, S.Ak.

NIP. 19771106 200502 1 004

NIP. 19960502 202203 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanti Dyah Wardani, A.Md.Farm.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Imam Kuncoro, S.E

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Susanti Dyah Wardani, A.Md.Farm.

NIP. 19911126 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
AUDITOR TERAMPIL
PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	4
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	15
3.	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	KKR	21
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Desa	KKP	8
5.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	8

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




Imam Kuncoro, S.E

Susanti Dyah Wardani, A.Md.Farm.

NIP. 19771106 200502 1 004

NIP. 19911126 202203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hetti Satya Nagrini, A.Md.

Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Imam Kuncoro, S.E.

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Imam Kuncoro, S.E.

NIP. 19771106 200502 1 004

Hetti Satya Nagrini, A.Md.

NIP. 19901220 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Auditor Terampil
Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	5
2.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	KKP	19
3.	Terselesaikannya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	KKR	19
4.	Terselesaikannya Kertas Kerja Pengawasan Desa pada Wilayah II	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan Desa	KKP	8
5.	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	7

Pihak Kedua,



Imam Kuncoro, S.E

NIP. 19771106 200502 1 004

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,



Hetti Satya Nagrini, A.Md.

NIP. 19901220 202203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AFIRA FITRI HAPSARI, S.Tr.I.P.**

Jabatan : **JF PPUPD Ahli Pertama**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RUDY YANTI, S.E.**

Jabatan : **Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah
Kabupaten Purbalingga**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua,

RUDY YANTI, S.E.
NIP. 19720925 200312 2 002

Pihak Pertama

AFIRA FITRI HAPSARI, S.Tr.I.P.
NIP. 20031125 202409 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PPUPD Ahli Pertama
Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No	RENCANA KINERJA OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1.	Terselesaikanya Kertas Kerja Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kertas Kerja	7
2.	Terselesaikanya Kertas Kerja Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kertas Kerja	2
3.	Terselesaikanya Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Kertas Kerja Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kertas Kerja	6
4.	Terselesaikanya Kertas Kerja Pengawasan Desa	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Desa	Kertas Kerja	1

Pihak Kedua,



RUDY YANTI, S.E.
NIP. 19720925 200312 2 002

Purbalingga, 12 Januari 2026
Pihak Pertama,



AFIRA FITRI HAPSARI, S.Tr.I.P.
NIP. 20031125 202409 2001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eny Wigati, SH
Jabatan : PPUPD Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Rudy Yanti, SE
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu III
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rudy Yanti, SE
NIP. 19720925 200312 2 002

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Eny Wigati, SH
NIP. 19711025 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

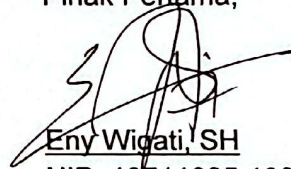
Unit Kerja: PPUPD Ahli Muda

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	3
		Jumlah KKP terkait Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KKP	5
2.	Terselesaikannya Pendampingan/Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan /Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	18
3.	Terselesaikannya Konsep Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Konsep LHP Reviu Laporan Kinerja	Konsep LHP	4
		Jumlah KKP terkait Reviu Laporan Kinerja	KKP	2
4.	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsep LHP	3
5	Terselesaikannya Konsep Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Konsep LHP Pengawasan Desa	Konsep LHP	1

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Rudy Yanti, SE
NIP. 19720925 200312 2 002

Eny Wigati, SH
NIP. 19711025 199403 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardawati, S.Sos, M. Si.

Jabatan : PPUPD Ahli Madya pada Irban Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Rudy Yanti, SE.

Jabatan : plt Irban Wilayah III

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua

Rudy Yanti, SE
NIP. 197209252003122002

Pihak Pertama

Mardawati, S.Sos, MSi
NIP 197211171993032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja: PPUPD Ahli Madya

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terkendalinya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP terkait Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	LHP	4
		Jumlah Konsep LHP terkait Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Konsep LHP	1
		Jumlah KKP terkait Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	KKP	2
2.	Terselesaikannya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	18
3.	Terkendalinya Laporan Reviu laporan Kinerja	Jumlah LHP Reviu Laporan Kinerja	LHP	14
4.	Terkendalinya Laporan Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan terkait Pengawasan keuangan Daerah	LHP	1
		Jumlah konsep LHP Pengawasan Keuangan Daerah	Konsep LHP	1
		Jumlah KKP Pengawasan Keuangan Daerah	KKP	1
5.	Terkendalinya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan Desa	Konsep LHP	1

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



Rudy Yanti, SE
NIP. 197209252003122002

Pihak Pertama,



Mardawati, S.Sos, M. Si
NIP. 197211171993032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subakir , S.Sos.

Jabatan : PPUPD Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Rudy Yanti, SE.

Jabatan : Plt Irban III Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak kedua

Rudy Yanti, SE
NIP. 197209252003122002

Pihak Pertama

Subakir, S.Sos.
NIP 196811271990031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PPUPD MADYA PADA IRBAN III
Unit Kerja: Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

No. (1)	Rencana Kinerja Operasional (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Terkendalinya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP terkait Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	LHP	3
		Jumlah KKP terkait Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	KKP	2
		Jumlah KKP terkait Pengawasan kinerja pemerintah daerah	KKP	3
2.	Terselesaikannya Pendampingan/asistensi pelaksanaan Urusan Pemerintah Dearah.	Jumlah Laporan pendampingan/asistensi urusan Pemerintah Dearah.	LHP	5
3.	Terkendalinya Laporan Reviu laporan Kinerja	Jumlah LHP Reviu Laporan Kinerja	LHP	8
		Jumlah KKP Reviu Laporan kinerja.	KKP	5
		Jumlah KKP Reviu Laporan kinerja	KKP	1
4	Terkendalikannya Laporan Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan terkait Pengawasan keuangan Daerah	LHP	1
5.	Terkendalinya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan Desa	LHP	1

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




Rudy Yanti, SE

Subakir, S.Sos.

NIP. 197209252003122002

NIP. 196811271990031005